



INSAN
TRANSPORTASI
Nelayani Negeri

Revisi 1

Rencana Aksi 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat151



ditjen_hubdat



hubdat.dephub.go.id



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)			
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	rasio	0.925	1. Sewa Alat Pengawasan Angkutan Jalan Perintis												512,782,130,000	Dit. Angkutan Jalan		
							2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan															Dit. Angkutan Jalan
							1. Subsidi Angkutan Antarmoda untuk Mendukung KSPN															Dit. Prasarana TJ
							2. Subsidi Angkutan Jalan Perintis															Dit. Prasarana TJ
							3. Trayek AKAP yang di layani															Dit. TSDP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
3	SP3	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0.016	1. Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor 2. Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor 3. Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor 4. Inspeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck) 5. Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang 6. Program Safety Riding 7. Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan 8. Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 9. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) 10. Bimbingan Teknis Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	0.06	0.03	0.027	0.025	0.025	0.023	0.023	0.019	0.019	0.018	0.016	0.016	4,607,381,000	Dit. Angkutan Jalan Dit. Sarana TJ Dit. Lalin
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0.085	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang TSDP	0.085	0.086	0.087	0.088	0.089	0.090	0.091	0.092	0.093	0.094	0.095	0.096	650,000,000	Dit. TSDP
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0.100	Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perhubungan Darat khususnya mengenai Investasi, Perizinan Berusaha, Keamanan dan Keselamatan dengan tujuan untuk mendapatkan Class Action dari masyarakat sebagai pelaku usaha/pelaksana kebijakan sehingga dapat mengukur/mengetahui/menilai indeks kualitas kebijakan. 1.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional 2.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan 3.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor 4.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	3,111,000,000	Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Hubdat
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	%	79.500	•Pelaksanaan 8 (delapan) pengungkit Reformasi Birokrasi : 1.Manajemen Perubahan ; 2.Deregulasi Kebijakan; 3.Penataan Tata Laksana 4.Penataan Organisasi; 5.Pengelolaan Manajemen SDM; 6.Penguatan Akuntabilitas; 7.Penguatan pengawasan; 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. •Evaluasi dan Penilaian capaian RB dengan sasaran : 1.Birokrasi yang bersih dan Akuntabel; 2.Birokrasi yang Kapabel; 3.Pelayanan Publik yang Prima	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	276,954,000	Bagian Kepegawaian, Setditjen Hubdat

Jakarta, September 2022

DIREKTUR JENDERAL

 Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat151



ditjen_hubdat



hubdat.dephub.go.id